



LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

2021

KATA PENGANTAR

Penyajian laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 merupakan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Fungsi dan Tugas pokok Dinas.

Laporan ini merupakan gambaran Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta cara pencapaian Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra).

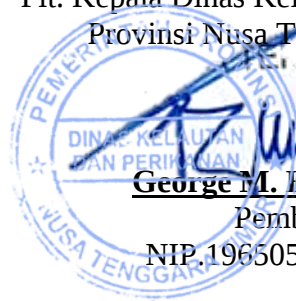
Kegiatan Tahun 2021 dievaluasi dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan yang dialami dalam pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai jadwal.

Dalam laporan ini dapat diukur manfaat organisasi hingga terwujudnya *Good Governance* yang lebih berkualitas, transparan dan partisipatif.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021, semoga dapat bermanfaat.

Kupang, 14 Januari 2022

Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



George M. Hadjoh, SH
Pembina
NIP.19650528 198603 1 014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Maksud dan Tujuan.....	5
C. Gambaran umum.....	5
BAB II. RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA.....	12
A. Renstra Strategis Organisasi.....	12
1. Visi	12
2. Misi	12
3. Tujuan dan Sasaran	12
3.1. Tujuan	12
3.2. Sasaran	13
B. Program dan Kegiatan	14
C. Indikator Kinerja Utama.....	16
D. Perjanjian Kinerja 2021.....	18
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Analisis capaian kinerja	20
a. Indikator Kinerja	20
b. Pengukuran Kinerja	21
B. Akuntabilitas keuangan	26
C. Permasalahan	44
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	45
B. Saran	45

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mempertanggung jawabkan kinerja suatu organisasi secara transparan, bersih, berhasil guna, perlu disusun laporan yang Akuntabel untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi dan tujuan organisasi.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur diukur melalui indikator kinerja input, output, outcome dan benefit bahkan sampai dengan impact.

Secara keseluruhan dalam Tahun Anggaran 2021, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengelola anggaran dari 4 (Tiga) sumber dana masing-masing :

1. DPA dari APBD I

Total Anggaran DPA Tahun 2021 (Belanja Publik) sebesar Rp **63.138.407.170,-** untuk 5 (lima) program dan 13 (tiga belas) kegiatan dengan hasil akhir pencapaian realisasi fisik sebesar 97,73% dan keuangan 95,86% atau Rp. **60.521.406.706;**

2. Dekonsentrasi APBN Pusat.

Pengelolaan APBN secara keseluruhan mencapai Rp. **1.664.633.000,-** dengan realisasi pelaksanaan fisik mencapai 98,58% dan keuangan 98,58% atau Rp. **1.640.912.359,-**

3. Pengelolaan DAK untuk tahun 2021 yaitu Rp. 14.536.850.320 dengan realisasi keuangan Rp. 13.874.306.453 (95,96 %) dan realisasi fisik 100%

4. PAD Dinas Kelautan dan Perikanan untuk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.5.750.138.637,45,- (41,70%) dari target sebesar Rp. 13.789.000.000,-

5. Produksi Perikanan Tangkap 179.427,04* Ton, Produksi Perikanan Budidaya 2.138.874* Ton, luas kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah daerah yaitu 701.548,79 ha, angka konsumsi ikan untuk tahun 2021 yaitu sebesar 45,92 Kg/Kapita/Tahun, kasus illegal fishing, Unreported dan Unregulated sebesar 14,29% dari target sebesar 30%.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk/format pertanggungjawaban atas pelaksanaan dan pencapaian Visi dan Misi yang dibebankan kepada instansi pemerintah yang berisi informasi seputar pencapaian pelaksanaan rencana kerja.

Secara umum LKIP ini bermanfaat untuk :

- Mendorong Instansi pemerintah melaksanakan *good governance*, secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan;
- Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*);
- Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Instansi Pemerintah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya LKIP ini adalah sebagai tindak lanjut (respon) terhadap Instruksi Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan disusunnya adalah mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya Rencana Kerja Tahunan 2021.

C. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan bidang pelayanan meliputi :

1. Tugas dan Fungsi SKPD

Tugas Pokok Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, melaksanakan urusan bidang Kelautan dan Perikanan.

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok dimaksud, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai fungsi :

- A. Pembinaan Umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- B. Pembinaan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan;
- C. Pembinaan dan pengawasan di bidang Kelautan dan Perikanan;
- D. Pembinaan dan perizinan di bidang Kelautan dan Perikanan;
- E. Pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- F. Penyelenggaraan rehabilitasi ekosistem/habitat sumberdaya kelautan;
- G. Pengelolaan Unit Instalasi Teknis;
- H. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DKP secara berjenjang, terkoordinasi, terdistribusi, efisien dan efektif, maka melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengatur uraian tugas dalam struktur organisasi DKP sebagai berikut:

1. Kepala

Merumuskan program kerja Dinas Kelautan dan Perikanan yang meliputi pengelolaan ruang laut dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, kesekretariatan serta cabang dinas berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan kinerja pelayanan pemerintahan yang baik, cepat dan tepat sesuai kebutuhan masyarakat.

2. Sekretaris

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program data dan evaluasi, keuangan, kepegawaian dan umum berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan administratif yang cepat, tepat dan lancar.

2.1. Sub Bagian Program Data dan Evaluasi

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan program, data dan evaluasi melalui pengumpulan data, mengolah dan menganalisa data serta menyusun pelaporan kinerja instansi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tersedia program, data dan hasil evaluasi yang akurat.

2.2. Sub Bagian Keuangan

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan urusan keuangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

2.3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kepegawaian dan umum melalui penyiapan bahan urusan kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan serta urusan rumah tangga dan perjalanan dinas berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tercipta penataan personalia yang kompeten sesuai perkembangan demi terwujudnya pengelolaan administrasi yang tepat dan akurat.

3. Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan ruang laut dan perikanan budidaya berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan.

4. Bidang Perikanan Tangkap

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perikanan tangkap melalui pengelolaan penangkapan ikan dan kenelayanan, pengendalian dan penangkapan ikan serta sarana dan prasarana perikanan tangkap sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya peningkatan dan pengembangan perikanan tangkap secara optimal.

5. Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil melalui pengawasan

pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan serta penegakan hukum perikanan dan kelautan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan.

6. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengembangan usaha dan pengolahan hasil perikanan dan pengembangan usaha, pengolahan dan pembinaan mutu, pemasaran dan promosi investasi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan untuk perluasan pangsa pasar secara maksimal.

7. Cabang Dinas

Melaksanakan tugas dan fungsi dengan cara berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi cabang dinas dan memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan program sesuai dengan lingkup kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya
- 2) Koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya
- 3) Koordinasi dan pelaksanaan administrasi sesuai dengan kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Cabang Dinas kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- Kepala;
- Subbagian Tata Usaha;
- Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- Seksi Konservasi perairan, Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai 7 (tujuh) Cabang Dinas yaitu :

- ❖ Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah kerja Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Sabu Raijua, di Bolok;
- ❖ Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah kerja Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Timor Tengah Selatan, di Atambua;;
- ❖ Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah kerja Kabupaten Alor di Kalabahi;
- ❖ Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah kerja Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, dan Kabupaten Sikka, di Larantuka;
- ❖ Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah kerja Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo, dan Kabupaten Ngada, di Ende;
- ❖ Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah kerja Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Timur, di Labuan Bajo;
- ❖ Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah kerja Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya, di Waingapu;

- **Kepala Cabang Dinas**

Merencanakan operasional dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan program, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pengelolaan kawasan konservasi perairan dan pulau-pulau kecil, dan penatausahaan cabang dinas berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan kinerja pelayanan pemerintahan yang baik, cepat dan tepat sesuai kebutuhan masyarakat.

- **Sub Bagian Tata Usaha**

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga cabang dinas berdasarkan ketentuan dan prosedur

yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efektif dan efisien.

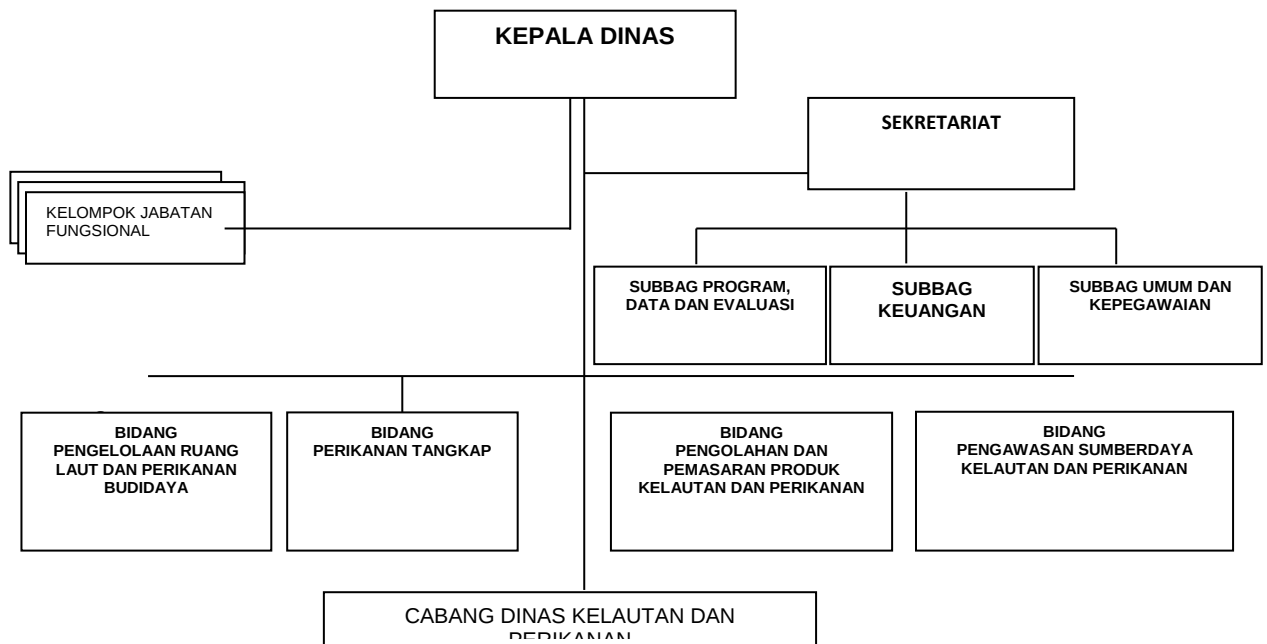
- **Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan**

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terpeliharanya sumber daya alam hayati dan ekosistem kelautan dan perikanan.

- **Seksi Konservasi Perairan, Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan, pemanfaatan kawasan konservasi perairan, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terpeliharanya sumber daya alam hayati dan ekosistem kelautan dan perikanan.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dibawah ini :



Gambar : Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT

2.Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 136 orang. Dari tingkat pendidikan (per 1 Januari tahun 2021) dapat diperinci, sebagai berikut :

S3 (Doktor)	: 1 Orang
S2 (Pasca Sarjana)	: 10 orang
S1 (Sarjana/Diploma-IV)	: 81 orang
Sarmud/Diploma III	: 4 orang
SLTA/Sederajat	: 37 orang
SMP/Sederajat	: 1 orang
SD	: 2 orang

3.Aset

Untuk mendukung pelaksanaan dan tugas pokok DKP-NTT, Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki aset sebagai berikut :

- 1) Tanah Seluas 554.377,21 M2 yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota yaitu Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Alor, Lembata, Flotim, Ende, Ngada, Nagekeo, Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Barat, Sumba Timur;
- 2) Gedung dan Bangunan sejumlah 27 Unit dengan nilai sebesar Rp.4.035.528.418,-;
- 3) Kendaraan Roda 4 berjumlah 12 unit.

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KERJA

A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

1. VISI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan tetap mendukung Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk tahun 2018 – 2023. Visi RPJMD 2018 – 2023 menggambarkan cita – cita yang ingin dicapai oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada kurun waktu lima tahun yaitu **“NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”**.

2. MISI

Dinas Kelautan dan Perikanan mendukung Misi kepala daerah dan Wakil Kepala daerah yaitu Misi 1 : mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil ; dan misi yang ke – 2 yakni membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*).

3. TUJUAN DAN SASARAN

Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Nusa Tenggara Timur sesuai dengan Visi dan Misi tersebut di atas, pada hakekatnya ditujukan untuk :

3.1. TUJUAN:

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dalam kerangka pembangunan jangka menengah adalah:

- 1) Menciptakan kemandirian dan stabilitas usaha kelautan dan perikanan ;
- 2) Menciptakan masyarakat perikanan yang berkeadilan sosial;
- 3) Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil serta pemanfaatan sumber daya alam kelautan dan perikanan secara berkelanjutan;

- 4) Meningkatkan pengolahan sumberdaya alam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menunjang pariwisata bahari yang berkelanjutan;
- 5) Mengembangkan kawasan konservasi perairan untuk mendukung perikanan berkelanjutan pariwisata bahari dan kelestarian lingkungan;
- 6) Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang peningkatan produksi perikanan;
- 7) Meningkatkan SDM sektor kelautan dan perikanan;
- 8) Menciptakan birokrasi yang professional, adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi bebas dan bersih KKN di sektor kelautan dan perikanan;

3.2. SASARAN :

Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan adalah:

- 1) Menciptakan kemandirian dan stabilitas usaha kelautan dan perikanan, yang meliputi:
 - a. Meningkatnya ketersediaan aksesibilitas, kualitas dan keamanan produk perikanan;
 - b. Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan sektor kelautan dan perikanan;
 - c. Meningkatnya iklim investasi dan usaha yang kondusif serta kesempatan kerja yang merata di sektor kelautan dan perikanan.
- 2) Menciptakan masyarakat perikanan yang berkeadilan social, yang meliputi:
 - a. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan kelautan dan perikanan;
 - b. Meningkatnya ketersediaan dan akses terhadap layanan sektor perikanan dan kelautan;
- 3) Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil serta pemanfaatan sumber daya alam kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, yang meliputi: Tersedianya lingkungan perairan yang mampu mendukung pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal;
- 4) Meningkatkan pengolahan sumberdaya alam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menunjang pariwisata bahari yang berkelanjutan, yang meliputi: tersedianya sumber daya alam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menunjang pariwisata bahari yang berkelanjutan;

- 5) Mengembangkan kawasan konservasi perairan untuk mendukung perikanan berkelanjutan pariwisata bahari dan kelestarian lingkungan, yang meliputi: meningkatnya efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan;
- 6) Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang peningkatan produksi perikanan yang meliputi: meningkatnya sarana dan prasarana produksi perikanan;
- 7) Meningkatkan SDM sektor kelautan dan perikanan yang meliputi:
 - a. Meningkatnya kualitas SDM aparatur sektor kelautan dan perikanan;
 - b. Meningkatnya kualitas SDM pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan.
- 8) Menciptakan birokrasi yang professional, adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi bebas dan bersih KKN di sektor kelautan dan perikanan, yang meliputi: meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan system pelayanan publik sektor kelautan dan perikanan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan partisipatif.

B. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan, maka Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan dari Program ini meliputi :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Kegiatan dari Program ini meliputi :

- a. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas

- b. Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
- c. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

3. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Kegiatan dari Program ini meliputi :

- a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
- b. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- c. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
- d. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- e. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi

4. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

- a. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- b. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut

5. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

- a. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil

6. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

- a. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
- b. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

C. Indikator Kerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, maka Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut

Tabel Indikator Kinerja Utama

INDIKATOR KINERJA	RUMUSAN INDIKATOR KINERJA SASARAN
Presentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	$\frac{(\text{Realisasi Tahun } n - \text{Realisasi Tahun } n-1)}{\text{Target Tahun } n} \times 100\%$
Presentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	$\frac{(\text{Realisasi Tahun } n - \text{Realisasi Tahun } n-1)}{\text{Target Tahun } n} \times 100\%$
Persentase Peningkatan Angka Konsumsi Ikan (AKI)	$\frac{(\text{Realisasi Tahun } n - \text{Realisasi Tahun } n-1)}{\text{Target Tahun } n} \times 100\%$
Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$
Penurunan Kasus UU Fishing (<i>Illegal, Unregulation, Unreport Fishing</i>)	$\frac{\text{Total Kasus Pelanggaran}}{\text{Total Kasus keseluruhan}} \times 100\%$

D. Perjanjian Kinerja 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET/OUTPUT		OUTCOME	BENEFIT	IMPACT
			REALISASI 2020	TARGET 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Potensi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menunjang wisata bahari	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola	40,93%	72%	Meningkatnya kualitas sumberdaya alam dan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.	Tersedianya lingkungan perairan yang mampu mendukung pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal.	Terjaganya kelestarian sumberdaya alam dan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.
	Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Lingkungan perairan secara berkelanjutan						
2.	Meningkatnya Produktifitas kapal perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	18,80%	4%	Adanya peningkatan produktifitas kapal perikanan	Meningkatnya nilai tukar nelayan (NTN).	Meningkatnya kesejahteraan nelayan di 22 kabupaten/kota
	Restrukturisasi armada penangkapan ikan						

3.	Peningkatan kesejahteraan nelayan dan petani/pembudidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	4,64%	5%	Tersedianya hasil produksi perikanan budidaya.	Meningkatnya nilai tukar pembudidaya (NTB).	Meningkatnya kesejahteraan bagi Pembudidaya di 22 kabupaten/kota
4.	Tersedianya lingkungan perairan yang bebas IUU <i>Fishing</i> untuk perikanan berkelanjutan	Penurunan Kasus UU <i>Fishing</i> (<i>Illegal, Unregulation, Unreport Fishing</i>)	12,5%	30%	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan perikanan.	Menurunnya kasus <i>Illegal Fishing</i> dan terjaganya kelestarian biota laut.	Tidak terjadinya kelebihan penangkapan ikan (<i>overfishing</i>)
5.	Meningkatnya angka Konsumsi Ikan	Persentasi Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	4,00%	9,52%	Adanya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan.	Terpenuhinya kebutuhan protein ikan bagi masyarakat.	Menurunnya angka stunting.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

1. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja kegiatan dikategorikan dalam kelompok :

1.1. Masukan (*Inputs*)

Segala sesuatu yang diperlukan sehingga pelaksanaan kegiatan dan program dapat terlaksana.

1.2. Keluaran (*Outputs*)

Segala sesuatu yang berupa produk/jasa sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.

1.3. Hasil (*Outcomes*)

Adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.

1.4. Manfaat (*Benefits*)

Kegunaan suatu keluaran yang dirasakan oleh masyarakat.

1.5. Dampak (*Impact*)

Ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang diawali oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung oleh Perangkat Daerah

untuk melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra.

Untuk mengukur capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Penetapan Kinerja maka dilakukan pengukuran capaian kinerja dan metode yang digunakan adalah pengukuran kinerja:

2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan metode Penyimpulan Capaian Sasaran dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran *ordinal* sebagai berikut :

- $X \geq 85 \%$: Sangat Berhasil
- $70 \% \leq X < 85 \%$: Berhasil
- $55 \% < X < 70 \%$: Cukup Berhasil
- $X \leq 55 \%$: Belum Berhasil

Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kurun waktu tahun 2021 telah berdampak signifikan bagi kemajuan dan perkembangan sektor kelautan dan perikanan.

Adapun capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan antara lain sebagai berikut:

Dari tabel diatas dapat diuraikan capaian indikator-indikator kinerja sasaran dimaksud sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA SASARAN RENSTRA					
INDIKATOR KINERJA	RUMUSAN INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN 100%
Presentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Total Produksi Perikanan Tangkap tahun berjalan	%	4	101,06	100
Presentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Total Produksi Perikanan Budidaya tahun berjalan	%	5	102,29	100
Persentase Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	Total ikan yang dikonsumsi per kapita per tahun	%	9,52	9,33	98,00
Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola	Total Luas Kawasan Konservasi Hingga tahun berjalan	%	72	103,78	100
Penurunan Kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreport Fishing)	Total kasus/ total kasus sampel	%	30	10,34	100

1) Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

Sepanjang tahun 2021, salah satu program strategis yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT adalah Budidaya Kerapu dan Kakap (Percontohan di Pulau Semau). Akan tetapi pada Tahun ini hanya mengalokasikan anggaran hanya untuk pembelian pakan dan operasional saja. Terdapat pembangunan tambat kapal atau perahu di Teluk Labuan Kelambu dengan menggunakan Dana DAK. Sedangkan untuk Rumput Laut terdapat pengadaan bantuan sarana budidaya berupa paket sarana budidaya dan sarana produksi sebesar 69.400 Kg kepada pembudidaya di 7 (tujuh) Kabupaten antara lain Kab. Sabu Raijua, Kab. Nagekeo, Kab. Ngada, Kab. Sumba Timur, Kab. Alor, Kab. Lembata dan Kab. Manggarai Barat. Adapun Capaian Kinerja Prosentase Peningkatan Produksi Budidaya dapat dilihat pada Tabel I

Tabel I. Capaian Kinerja Prosentase Peningkatan Produksi Budidaya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2020	2021		Capaian (%)
				Target	Realisasi	
1.	Prosentase Peningkatan Produksi Budidaya	%	1,08	5	6,01	100

Produksi perikanan budidaya di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2021 sebesar 2.138.874* Ton, atau 101,16 % dari target Produksi perikanan budidaya pada tahun 2021 yaitu sebesar 2.111.439,99 Ton ini menunjukkan adanya kenaikan tingkat produksi dibandingkan dengan produksi tahun sebelumnya yaitu sebesar 2.010.895,23.

2) Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

Dari luasnya perairan di Provinsi NTT, terdapat peluang sumber daya perikanan tangkap dengan potensi lestari sebesar 491.700 ton/tahun. Untuk mendukung peningkatan kinerja pengelolaan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi mengalokasikan anggaran pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 38.870.893.555,- dengan realisasi Rp.38.269.941.700,- (98,54%). Capaian Kinerja Pengelolaan Perikanan Tangkap dapat dilihat pada Tabel II.

Tabel II. Capaian Kinerja Pengelolaan Perikanan Tangkap

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2021	2021		Capaian (%)
				Target	Realisasi	
1.	Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	1,04	4	5,98	100

Produksi perikanan tangkap pada tahun 2021 yaitu sebesar 183.544 Ton sedangkan target tahun 2021 yaitu 179.427,04 ton. Capaian kinerja produksi perikanan tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan mencapai target sebesar 102,29 %, ini menunjukkan adanya kenaikan tingkat produksi perikanan tangkap dibandingkan pada tahun 2020 yaitu sebesar 172.526 Ton.

3) Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah

Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) adalah kawasan perairan yang dilindungi dan dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungan secara berkelanjutan. Manfaat dari konservasi perairan terhadap perikanan yaitu dapat melindungi spesies ikan yang bernilai ekonomis serta dapat menjaga stock ikan agar tetap terjaga, diperlukan peran pemerintah untuk menjaga potensi kelautan dan perikanan agar tetap lestari. Luas kawasan konservasi di wilayah perairan NTT adalah 4.201.548 Ha dengan persentase 21,83% dari luas laut NTT. Sedangkan luasan kawasan konservasi yang dikelola oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebesar 701.548,79 ha atau hanya 16,07 % dari luas kawasan perairan di Nusa Tenggara Timur. Adapun Capaian indikator Kinerja Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah dapat dilihat dari Tabel III.

Tabel III. Capaian Indikator Kinerja Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2020	2021		Capaian %
				Target	Realisasi	
1.	Prosentase Luas Kawasan Perairan Daerah	%	100	71,56	103,78	100

Pada tahun 2021 target luasan kawasan konservasi perairan daerah sebesar 475.912,61 Ha dengan realisasi mencapai 701.548,79 Ha atau 103,78%. Peningkatan kawasan konservasi perairan daerah karena ditetapkan 3 kawasan baru yaitu KKD Flores Timur (150.069,35 ha), KKD Lembata (199.688,38 HA), Sikka (75.097,68) yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: 94/KEPMEN-KP/2021, Nomor: 95/KEPMEN-KP/2021, Nomor: 96/KEPMEN-KP/2021 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Daerah di NTT.

4) Prosentase Peningkatan Angka Konsumsi Ikan

Dalam hal penjaminan mutu, promosi dan distribusi produk perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2021 berdampak pada peningkatan Angka Konsumsi Ikan (AKI) masyarakat Nusa Tenggara Timur. Adapun Capaian indikator Kinerja angka konsumsi ikan dapat dilihat dari Tabel IV.

Tabel IV. Capaian Indikator Kinerja Angka Konsumsi Ikan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2020	2021		Capaian
				Target	Realisasi	
1.	Prosentase Angka Konsumsi Ikan	%	96,16	9,52	9,33	98,00

Kegiatan perhitungan Angka konsumsi ikan tingkat Provinsi NTT tahun 2021 berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi, dengan Target angka konsumsi ikan (AKI) Tahun 2021 yaitu 9,52 % sedangkan realisasinya yaitu 9,33 % dibandingkan capaian kinerja untuk tahun 2021 yaitu 98,00, hasil perhitungan angka konsumsi ikan untuk tahun 2021 yaitu sebesar 45,92 Kg/Kapita/Tahun atau 98,00% dari target yaitu 9,52 % 2021.

5) Penurunan Kasus *IUU Fishing (Illegal, Unregulated, Unreported fishing)*

Wilayah perairan laut provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai potensi sumberdaya ikan yang cukup besar yang terbagi dalam 3 (tiga) Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP-NRI) antara lain: WPP-NRI: 573, 713 dan 714. Kondisi ini perlu dijaga, dikendalikan, dan dipertahankan agar supaya peningkatan yang terjadi akan semakin membaik dimasa yang

akan datang. Namun dalam pelaksanaannya disinyalir telah terjadi kegiatan *Over Fishing*, hal ini disebabkan karena terjadinya penangkapan yang berlebihan dan cara penangkapan yang dapat merusak lingkungan. Pelanggaran yang terjadi antara lain adalah pelanggaran bidang perikanan (IUU Fishing) terdiri dari Illegal Fishing, Un Reported dan Un Regulated, jumlahnya relative banyak, khususnya untuk pelanggaran penangkapan ikan tanpa dokumen perikanan (dokumen perijinan sudah mati). Dalam operasi bersama Lamtamal dan polisi perairan yang diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali dari 32 (tiga puluh dua) kapal ditemukan pelanggaran sebanyak 3 (tiga) kapal sehingga didapatkan 29 (dua puluh Sembilan) kapal yang tertib dan mempunyai kelengkapan dokumen. Dilihat dari tingkat pelanggaran IUU Fishing yang didapatkan dapat dijelaskan bahwa terjadi penurunan kasus illegal fishing, Unreported dan Unregulated sebesar 10,34% dari target sebesar 30%. Hal ini menggambarkan bahwa telah terjadinya kesadaran dari para pelaku usaha (nelayan) dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Adapun Capaian Kinerja penurunan kasus IUU Fishing (illegal, Unregulated, Unreported fishing) dapat dilihat pada Tabel V

Tabel V. Capaian Indikator Kinerja Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulated, Unreported fishing)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2020	2021		Capaian %
				Target	Realisasi	
1.	Prosentase penurunan Kasus IUU (illegal, Unregulated, Unreported fishing)	%	87,5	30	10,34	152,37

B. Akuntabilitas Keuangan

Penjabaran Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yang mendukung indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan antara lain sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Ruang Laut dan Pulau-Pulau Kecil

Program Pengelolaan Ruang Laut dan Pulau-Pulau Kecil dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.806.381.060,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.560.449.680,- atau 86,29%. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- Sosialisasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) di Kabupaten Flores Timur, Lembata dan Sikka setelah proses panjang upaya yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT akhirnya membuahkan hasil. Terbukti pada Tanggal 21 Oktober 2021 telah ditetapkan 3 (tiga) Kawasan Konservasi Daerah (KKD) yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain: Kabupaten Flores Timur (150.069,35 ha), Lembata (199.688,38 ha) dan Sikka (75.097,68 ha) melalui KEPMEN KP Nomor 94, 95 dan 96 Tahun 2021. Jumlah tersebut menambah total luasan 5 kawasan konservasi di NTT menjadi 4.201.548.79 ha dengan 2 kawasan lainnya antara lain TNP Laut Sawu sebanyak 3,5 ha serta SAP Alor sebesar 276.693,38 ha. Optimalisasi pengelolaan KKPD yang telah ditetapkan harus selalu melakukan Koordinasi dan komunikasi antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten harus dilakukan agar tercipta kesinambungan. Pagu anggaran sebesar Rp. 117.859.198,- akan tetapi difokuskan semua. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya sosialisasi KKPD kabupaten Sikka, Flores Timur, Lembata dengan penetapan kawasan konservasi sebesar 426.690 ha;
- Daya Dukung dan Daya Tampung merupakan salah satu indikator rujukan pengelolaan (*management reference indicator*) pariwisata berkelanjutan. Dengan demikian mengetahui daya dukung lingkungan adalah sangat penting untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Berdasarkan daya dukung lingkungan target dan tujuan kinerja pariwisata berkelanjutan dapat ditentukan serta bagaimana cara atau pendekatan untuk mencapai target dan tujuan itu dapat dirumuskan. Penggunaan anggaran hanya untuk pembayaran jasa tenaga honorer yang bekerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT serta pembayaran internet. Pagu anggaran sebesar Rp. 117.962.160,- terealisasi sebesar Rp. 30.464.490,- atau 78,64%;
- Tambat Kapal / Perahu dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.400.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 833.358.000,- atau 59,52% dengan hasil fisik

sebesar 100% dengan hasil terlaksananya pembangunan tambat Kapal di Labuan Kelambu (Kabupaten Ngada);

- Mooring Bouy (Penanda zona) kawasan sebanyak 4 (empat) buah dengan lokasi di Kabupaten Flores Timur sebanyak 2 paket, Sikka sebanyak 1 paket dan Lembata sebanyak 1 paket. Pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 199.900.000,- atau sebesar 99,95% dengan hasil Terlaksananya kegiatan pengadaan mooring buoy Adapun mooring buoy disini digunakan untuk menambatkan kapal (*vessel*) baik kapal pariwisata, kapal nelayan, kapal kargo hingga kapal pribadi pada saat berada di perairan laut dalam maupun perairan dangkal.

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Pengelolaan Perikanan Tangkap, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 38.870.893.555,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.38.269.941.700,- atau 98,45% dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- Operasional Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Oeba.

Jumlah rekomendasi BBM di bidang perikanan tangkap sebanyak 1.850 liter dan jumlah rekomendasi izin yang masuk di Pelabuhan Oeba ada 3 rekomendasi. Realisasi PAD pada PPI Oeba per 16 Desember 2021 di Tahun 2021 dengan target Rp. 950.000.000,- mencapai angka Rp. 1.074.238.462,- atau mencapai realisasi 116,13%. Adapun rekapitulasi PAD Tahun 2021 meliputi: sewa (tanah, bangunan, lapak, air, kapal dan ruang terbuka), parkir, labuh kapal, dokumen tambat, bengkel dan perizinan (SKAI, SIUP, SIPI, SIPI ANDON);

- Rekomendasi dan Perizinan Bidang Perikanan Tangkap

Sepanjang Tahun 2021, bidang tangkap telah mengeluarkan beberapa jenis surat rekomendasi yang meliputi: Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) dan Surat Tanda Keterangan Andon (STKA). Jumlah rekomendasi dan perizinan periode Bulan Januari-Desember 2021 antara lain adalah sebagai berikut: SIPI 360, SIUP 25, TDKP 1.021, SIPI ANDON 201, TDKP ANDON 8, STKA 10, SIKPI 11 rekomendasi.

Selain melaksanakan kegiatan yang menggunakan dana yang bersumber dari APBD, bidang Perikanan Tangkap juga melakukan kegiatan yang bersumber dari APBN, adapun rincian kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

- Kegiatan Sehat Nelayan yang dilaksanakan di 5 (lima) kabupaten meliputi: Kabupaten Ende, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Kupang, Kota Kupang dan Manggarai Barat. Berdasarkan hasil identifikasi Calon Peserta Calon Lokasi (CPCL) Sertifikat Tanah (SEHAT) Nelayan Tahun 2021 dapat dilaporkan bahwa Kabupaten Ende sebanyak 48 peserta, Kabupaten Kupang sebanyak 43 peserta, Kabupaten Manggarai Barat 100 peserta, Kabupaten Sumba Timur sebesar 43 peserta, untuk Kota Kupang tidak melakukan identifikasi. Output dari kegiatan tersebut adalah identifikasi kelompok dan verifikasi kegiatan SEHAT nelayan untuk Tahun Anggaran 2021;
- Pembayaran Honor Statistik Perikanan Tangkap dengan mengakomodir petugas validator dan enumerator di provinsi dan 22 Kabupaten/kota. Pendataan perikanan tangkap di Tahun Anggaran 2021 diinput pada aplikasi Satu Data Pusdatin Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan jumlah petugas statistik (yang meliputi: validator dan enumerator) di semua Kabupaten/Kota. Output dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya pembiayaan honor statistik perikanan tangkap sebanyak 44 orang di 22 Kabupaten/Kota di wilayah NTT.
- Dukungan Program Strategis Gubernur diantaranya :
 - a. Pengadaan Kapal 1 GT lengkap dengan alat tangkap sebanyak 125 unit;
 - b. Pengadaan Kapal 3 GT sebanyak 65 unit dan;
 - c. Pengadaan kapal ketinting 130 unit yang tersebar di 22 Kabupaten/Kota.

3. Program Perikanan Budidaya

Program Perikanan Budidaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.273.141.213,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.951.638.316,- atau 90,18%. Adapun kegiatan yang dilakukan menggunakan dana yang bersumber dari APBD antara lain:

- Peningkatan Produksi Rumput Laut

Pengembangan Budidaya Rumput Laut yang diwujudkan dengan pemberian bantuan berupa paket sarana budidaya dan sarana produksi sebanyak 41.000 Kg dan bibit Rumput Laut sebanyak 28.400 Kg sehingga total realisasi bantuan sebesar 69.400 kg kepada pembudidaya dengan lokasi Kabupaten Sabu Raijua, Nagekeo, Ngada, Sumba Timur, Alor, Lembata dan Manggarai Barat dengan sasaran 137 kelompok dan 1.338 orang yang terdiri dari:

- a. Sebanyak 67 (enam puluh tujuh) kelompok dan 680 (enam ratus delapan puluh) orang di Kabupaten Alor dengan volume sebesar 34.000 kg;
- b. Sebanyak 5 (lima) kelompok dan 50 (lima puluh) orang di Kabupaten Nagekeo dengan volume sebesar 2.500 kg;
- c. Sebanyak 4(empat) kelompok dan 26 (dua puluh enam) orang di Kabupaten Ngada dengan volume sebesar 1.300 kg;
- d. Sebanyak 11 (sebelas) kelompok dan 110 (seratus sepuluh) orang di Kabupaten Sumba Timur dengan volume sebesar 5.500 kg;
- e. Sebanyak 41 (empat puluh satu) kelompok dan 433 (empat ratus tiga puluh tiga) orang di Kabupaten Alor dengan volume sebesar 21.650 kg;
- f. Sebanyak 5 (lima) kelompok dan 49 (empat puluh sembilan) orang di Kabupaten Lembata dengan volume sebesar 2.450 kg;
- g. Sebanyak 4 (empat) kelompok dan 40 (empat puluh) orang di Kabupaten Manggarai Barat dengan volume sebesar 2.000 kg.

Diharapkan dengan pemberian bantuan tersebut kepada para pembudidaya Rumput Laut dapat meningkatkan pendapatan yang berdampak pada kesejahteraan rakyat pada umumnya dan masyarakat NTT pada khususnya;

- Bantuan Paket Lele Pekarangan

Pengembangan Budidaya Lele pekarangan yang diwujudkan dengan pemberian bantuan berupa paket sarana budidaya dan sarana produksi berupa terpal ukuran 3x2x1cm sebanyak 2 unit perkelompok, pakan ikan 781-1 sebanyak 2 sak, pakan ikan 781-2 sebanyak 2 sak, pakan ikan FF-999

sebanyak 1 sak, papan panjang 4 meter sebanyak 12 lembar, kayu usuk ukuran 5x7cm sebanyak 6 batang, paku biasa 7 cm sebanyak ½ kg, dan bibit ikan lele sebanyak 1.000 ekor yang berlokasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 27 paket dan jumlah per kelompok sebanyak 10 orang dengan total anggaran yang diterima sebesar Rp. 7.981.120,- dengan hasil terlaksananya bantuan paket lele pekarangan dan hasil meningkatnya produksi perikanan budidaya. Pagu Anggaran sebesar Rp. 199.999.820,- dengan realisasi sebesar Rp. 144.219.320,- atau fisik sebesar 100%;

- Pendampingan Hukum Kasus perkara perdata No: 76/Pdt.G/2020/PN Olm yang dimana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai tergugat I dan Sanci Norenci Mooy dan kawan-kawan (dkk) sebagai para penggugat atas perkara sengketa tanah di desa Tanah Merah Kabupaten Kupang. Pagu sebesar Rp. 114.900.000,- dengan realisasi sebesar Rp.41.420.000,- atau sebesar 100% dengan hasil terselesaikannya permasalahan hukum di lingkup masyarakat pesisir.
- Pengembangan budidaya Wae Rebo (Bibit Ikan Nila)
Kegiatan pengembangan budidaya Wae Rebo tidak terlaksana dikarenakan adanya refocusing anggaran.
- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan ikan di laut (bantuan kebun bibit rumput laut, budidaya ikan kerapu)
Kegiatan penyediaan Prasarana Pembudidayaan ikan di laut (bantuan kebun bibit rumput laut, budidaya ikan kerapu) kegiatan ini rencananya akan didanai oleh dana pinjaman dari pemerintah daerah (PEN) akan tetapi tidak dapat dilaksanakan karena karena dananya tidak jadi dipinjamkan.

Selain melaksanakan kegiatan yang menggunakan dana yang bersumber dari APBD, bidang Perikanan Budidaya juga melakukan kegiatan yang bersumber dari APBN, adapun rincian kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a. Survalance Hama Penyakit Ikan dengan lokasi di Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Tengah dengan target Unit Pembenihan dan

Pembudidaya ikan. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pantauan terhadap hama penyakit ikan Pada kelompok masyarakat dengan hasil Pengendalian terhadap penyebaran hama penyakit ikan di kolam-kolam rakyat. Pagu anggaran sebesar Rp. 41.550.000 dan Realisasi Rp. 40.650.000,- atau 97,83 % dan Fisik sebesar Rp. 100%;

- b. Paket bantuan sarana dan prasarana budidaya perikanan tersebar di 5 (lima) Kabupaten antara lain: Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 4 (empat) paket, Kabupaten Timor Tengah Utara sebanyak 1 (satu) paket, Kabupaten Belu sebanyak 4 (empat) paket, Kabupaten Alor sebanyak 6 paket dan Kota Kupang sebanyak 5 paket. Paket bantuan tersebut diantaranya meliputi budikdamber, ikan konsumsi Lele dan ikan konsumsi Nila dengan hasil terlaksananya bantuan budidaya dalam ember (budikdamber) dan meningkatnya produksi perikanan budidaya. Sumber dana dari KKP RI, Dirjen BD, Direktorat Produksi dan usaha budidaya;
- c. Pembinaan dengan pelaku usaha budidaya CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) target 30 orang dengan realisasi sebanyak 37 orang diikuti peserta dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Kegiatan yang dilaksanakan tersebut mendapatkan output sertifikat cara pembudidayaan ikan yang baik bagi pembudidaya ikan yang berkecimpung di bidang masing-masing. Diantara 37 (tiga puluh tujuh) sertifikat yang telah diperoleh baru bisa diakomodir sebanyak 27 (dua puluh tujuh) sertifikat, sedangkan sisanya belum bisa diakomodir dikarenakan belum mendapatkan sertifikat dari pusat. Pagu anggaran sebesar Rp. 52.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 52.300.000,- atau 99,61% dengan hasil Kota kupang

- (Pokdakan Karya Agri, Pokdakan Air Sagu dan Pokdakan Hosana), Kabupaten Kupang (Pokdakan Solideo, Pokdakan Rembes, Kolam Pembesaran Noekele, Pokdakan Sete, UPR Pisces, Pokdakan Dinda Sama, Pokdakan Iklas, Pokdakan Aku Ada, Pokdakan Keniis's, Pokdakan Ampera, Pokdakan Kandola, Pokdakan Dibda Sama Bajo, Pokdakan Memang Dia, Pokdakan Fadila, Pokdakan Rumput Hijau, Pokdakan Rumput Duyun, Pokdakan Aku Datang, Pokdakan Sama Bajo, Kolam Nunneo), Kabupaten Belu (Pokdakan Senamutu, Pokdakan Sukaria Debu Metan), Kabupaten Malaka (Pokdakan We Banibing, Pokdakan Uma Makbalin, Pokdakan Fautisin), Kabupaten Sabu Raijua (Lobo Murimada, Wue Wini), Kabupaten Manggarai Barat (Kolam Pembesaran Ikan Nila Nggorang), Kabupaten Manggarai (Pokdakan Paukuta I, UD. Graha Mina Lele Mayula), Kabupaten Sumba Tengah (Ku Coba Berjuang, Mileniel Malihe, Ruka Lori), dan Kabupaten TTU (Nunnapa, Timor Mandiri);
- d. Fasilitasi sertifikat hak atas tanah lahan budidaya bagi pembudidaya di 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dengan rincian jumlah sertifikasi yang telah dikeluarkan di Kabupaten TTS sebanyak 54 kelompok dengan luas lahan sebesar 21.859 m² dan di Kabupaten SDB sebanyak 14 kelompok dengan luas lahan sebesar 101.530 m² sehingga output yang dicapai adalah terfasilitasinya hak atas tanah bagi pembudidaya sebanyak 68 pembudidaya. Pagu anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 200.000.000 atau 100% dengan hasil Data inventarisasi kelompok calon sertifikasi telah dikirim ke KKP;
 - e. Bantuan sarana dan prasarana budidaya Ikan Lele/Nila system Bioflok untuk Nusa Tenggara Timur dari Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin dengan Nomor SK: PPK.19/BPBAT.MDG/KP.436/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 tentang Revisi Penerima Bantuan Pemerintah Sarana dan Prasarana

Budidaya Ikan Lele Sistem Bioflok Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 sebanyak 4 (empat) paket antara lain di Kabupaten Sumba Timur (1 paket), Sumba Barat Daya (1 paket), Kabupaten Kupang (1 paket) dan Kabupaten Timor Tengah Utara (1 paket). Selain itu terdapat bantuan sarpras dengan Nomor SK: PPK.685/BPBAT.MDG/KP.436/VIII/2021 Tanggal 06 Agustus 2021 tentang Tambahan Penerima Bantuan Pemerintah Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Lele Sistem Bioflok Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 sebanyak 4 (empat) paket antara lain di Kabupaten Sumba Timur (1 paket), Kabupaten Kupang (1 paket), Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 2 paket. Dengan sumber dana dari BBIP Mandiingin dengan output tersedianya sarana budidaya sistem bioflok ikan lele/nila. Dengan hasil tersalurnya bantuan 8 (delapan) paket sarana prasarana budidaya sistem bioflok ke masyarakat (kelompok);

- f. Layanan Data Statistik Perikanan Budidaya, dengan lokasi Kab. Timor Tengah Utara, Kab. Belu dan Kab. Malaka dengan sasaran pembudidaya ikan. Output terlaksananya kegiatan pendataan calon sertifikasi hak atas tanah sejumlah 16 kelompok untuk kabupaten TTU, 3 Kelompok untuk Kabupaten Belu, dan Kabupaten Malaka sebanyak 58 kelompok. Dengan luasan Kab. TTU 77.400 m², Kab. Belu 32.239 m² dan Kabupaten Malaka 591.573 m². Dengan hasil data inventarisasi kelompok calon sertifikasi telah dikirim ke KKP. Pagu anggaran sebesar Rp. 16.100.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 13.100.000,- atau 81,36 %;
- Program Strategis Pemerintah Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari:
 - a. Budidaya Kerapu dan Kakap (Percontohan di Pulau Semau)

Untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya diperaikan secara langsung di ekosistem berbasis aquaculture Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan

Keramba Jaring Apung (KJA) HDPE dengan spesifikasi khusus berbentuk bulat, memiliki jarring untuk pemeliharaan dengan diameter 10 meter dengan kedalaman jaring 8 meter. Di Tahun ini tidak mengalokasikan kegiatan/anggaran di Pulau Semaui hanya untuk pembelian pakan dan operasional saja.

b. Sea Ranching Ikan Kerapu dan Kakap (di Teluk Labuan Kelambu, Riung Kabupaten Ngada)

Sea Ranching adalah upaya pelepas-liaran benih ikan pada suatu perairan untuk peningkatan biomassa dalam rangka pencapaian produksi pada suatu waktu tertentu. Diharapkan dalam 2-3 tahun kedepan perairan Labuan Kelambu tersebut dapat memiliki Sumberdaya Ikan (Produksi Ikan Kerapu) yang berlimpah dan menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat sekitarnya. Sepanjang tahun 2021 terdapat kegiatan antara lain pembangunan Tambat kapal/perahu di Labuan Kelambu dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).

c. Budidaya Kerapu dan Kakap (Mulut Seribu)

Sepanjang tahun 2021 tidak terdapat kegiatan/penambahan anggaran yang berlangsung di Mulut Seribu hanya anggaran untuk pembelian pakan dan operasional saja.

d. Pengadaan Bantuan Sarana Budidaya Rumput Laut

Di Tahun 2021, pengadaan bantuan sarpras budidaya Rumput Laut diwujudkan dengan pemberian bantuan berupa paket sarana budidaya dan sarana produksi sebesar 69.400 kg kepada pembudidaya dengan lokasi Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Alor, Kabupaten Lembata dan Kabupaten Manggarai Barat dengan sasaran 137 (seratus tiga puluh tujuh) kelompok dan 1.338 orang.

Pengembangan budidaya air payau di Tambak Oesapa meliputi: kegiatan budidaya dan kegiatan operasional dengan hasil output kegiatan terlaksananya produksi benih ikan air payau.

- Pengembangan budidaya air tawar di BBIS Noekele meliputi: kegiatan budidaya, kegiatan operasional dan rehabilitasi unit perbenihan dengan hasil output kegiatan terlaksananya produksi benih ikan air tawar;
- Pengembangan sarana dan prasarana budidaya dilakukan dengan kegiatan rehabilitasi di BBIP Tablolong. Rehabilitasi tersebut dilakukan di berbagai aspek diantaranya: instalasi listrik, instalasi air, pemeliharaan gedung dan bangunan, pengadaan alat produksi perikanan berupa blower, kebutuhan untuk mess karyawan (berupa tempat tidur dan AC). Pada Bulan Desember 2021 dilakukan tebar benih ikan kerapu sebanyak 5.200 ekor di 3 bak pendederan dengan rincian bak pertama terdiri dari 1.925 ekor, bak kedua terdiri dari 1.625 ekor dan bak ketiga sebanyak 1.625 ekor. Diharapkan penebaran benih tersebut yang merupakan *running test* kegiatan budidaya dapat berhasil dengan baik sehingga diharapkan bertambah di tahun depan. Sehingga dapat dilakukan penebaran benih dengan padat tebar lebih banyak lagi dengan hasil output terlaksananya pengelolaan pembudidayaan ikan di laut.

4. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.823.300,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 292.124.160,- atau 97,11% dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Sepanjang tahun 2021 di Bidang PSDKP tidak banyak mendapatkan pagu anggaran untuk menunjang kegiatan dikarenakan anggaran terpotong/refocusing. Adapun kegiatan yang dilakukan menggunakan dana yang bersumber dari APBD antara lain:

- Pengawasan Pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil dengan pagu anggaran sebesar Rp. 264.663.120,- dengan kegiatan Gelar Operasi Pengawasan Rutin yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali Gelar Operasi Pengawasan tahap 1 dan Gelar Operasi Pengawasan tahap 2. Gelar operasi dilaksanakan selama 5 (lima) hari yaitu tanggal 15 sampai 20 Maret 2021

dengan waktu patroli 5 (lima) jam setiap hari sehingga total waktu pelaksanaan Patroli Tahap 1 adalah 25 jam. Adapun lokasi kegiatan pengawasan dan pemantauan ini meliputi beberapa wilayah antara lain: Perairan Selat Rote, Perairan pulau Kambing, perairan laut sawu, perairan teluk Kupang, perairan selat semau dan sekitarnya. Sarana Kapal Pengawas yang digunakan dalam Patroli Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Di Perairan NTT ini adalah Kapal Pengawas Napoleon 024-1202 yang merupakan Kapal Pengawas milik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kapal Pengawas ini memiliki panjang 12 meter, dengan Mesin bermerk Suzuki Kekuatan 500 PK (terdapat 2 mesin @250 PK). Gelar operasi kedua Gelar operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) tahap 2 Di Perairan NTT ini di laksanakan selama 5 (lima) hari, yaitu terhitung dari tanggal 22 s.d. 26 Maret 2021 dengan ketentuan 5 (lima) jam patroli setiap harinya (total waktu patroli 25 jam). Gelar operasi pengawasan rutin dengan hasil yang dicapai adalah terbinanya kapal nelayan sebanyak 32 kapal. Kegiatan ini melibatkan unsur terkait (KCD 01 dan juga Polair setempat) dengan menggunakan Kapal Pengawas Napoleon 0241202 yang dilaksanakan 2 (dua) kali yaitu di tanggal 15-19 Maret 2021 dan pada tanggal 22-26 Maret 2021 dengan hasil pengawasan kapal sebanyak 32 (tiga puluh dua) ditemukan terdapat 3 (tiga) kapal yang melanggar peraturan. Ketiga kapal tersebut dinyatakan melanggar aturan dikarenakan tidak membawa kelengkapan dokumen yang diminta/sudah habis masa berlaku ijinnya seperti: Surat Persetujuan Berlayar (SPB), SLO, Sertifikat Kelayakan Mati, Pas Besar Mati. Pelanggaran tersebut selanjutnya diberikan tindakan dengan tidak melanjutkan kegiatan penangkapan ikan, melakukan BAP terhadap 2 Kapal, memberikan Peringatan tertulis kepada pelaku.

- Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 mil dengan pagu anggaran sebesar Rp. 36.160.180,-. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan Pengawasan terhadap pembangunan bangunan komersil di pesisir pantai di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2021.

Selain melaksanakan kegiatan yang menggunakan dana yang bersumber dari APBD, bidang PSDKP juga melakukan kegiatan yang bersumber dari APBN, adapun rincian kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

- Kegiatan Penilaian POKMASWAS

Diadakan perlombaan POKMASWAS terbaik di 2 (dua) Kabupaten diantaranya adalah Kabupaten Flores Timur dan Kota Kupang. Untuk Kabupaten Flores Timur dimenangkan oleh “POKMASWAS AHA BELEN” untuk POKMASWAS terbaik dari Kota Kupang dimenangkan oleh “POKMASWAS BAHARI”. POKMASWAS merupakan pelaksana pengawasan di tingkat lapangan yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, lembaga swadaya masyarakat, nelayan, petani ikan serta masyarakat maritim lainnya. Tujuan penilaian POKMASWAS adalah mengukur kinerja POKMASWAS dalam melaksanakan perannya dalam pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan. Terdapat beberapa penilaian yang dilaksanakan dalam kegiatan pengawasan tersebut diantaranya adalah:

1. Aspek Teknis;

Terkait dengan kemampuan kelompok, pelaporan, penanganan kasus pelanggaran, kegiatan pertemuan-pertemuan yang telah dilakukan dan sarana dan prasarana yang dimiliki.

2. Aspek Sosial;

Partisipasi anggota dalam kelompok dengan lembaga/instansi terkait.

3. Aspek Manajemen.

Pola pengembangan, pembinaan serta pemberdayaan POKMASWAS dalam mengikuti kegiatan/lomba.

Adapun output dari kegiatan ini adalah terlaksananya penilaian POKMASWAS yang sesuai dengan kriteria sebanyak 2 kelompok POKMASWAS yaitu “POKMASWAS AHA BELEN” di Kabupaten Flores Timur dan “POKMASWAS BAHARI” di Kota Kupang.

- Kegiatan Pembinaan POKMASWAS

POKMASWAS berperan aktif dalam keikutsertaannya untuk menjaga dan melestarikan sumber daya perikanan di wilayah perairan nusantara. Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki keanekaragaman adat dan budaya, POKMASWAS bisa tumbuh dan berkembang di dalamnya. Sejalan dengan itu proses

cerdas pun terjadi, POKMASWAS mampu menerjemahkan diri dan posisinya sebagai kekuatan lokal yang mengedepankan pendekatan adat dan kearifan lokal. Ini tentu perkembangan yang baik bagi hukum positif, sebab sebagai bagian dari tradisi lokal hukum adat lebih melekat pada masyarakat. Di Tahun 2021 ini target pembinaan POKMASWAS sebesar 22 POKMASWAS dengan realisasi sebesar 100% output dari kegiatan ini adalah terbinanya POKMASWAS yang aktif sebanyak 22 POKMASWAS.

5. Program Pengelolaan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan

Pengelolaan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan (P3KP), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.122.091.980,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 91.703.000,- atau 75,11% dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Sepanjang tahun 2021 di Bidang P3KP tidak mendapatkan pagu anggaran untuk menunjang kegiatan dikarenakan anggaran terpotong/refocusing. Adapun kegiatan yang dilakukan menggunakan dana yang bersumber dari APBD antara lain:

- Kegiatan perhitungan Angka Konsumsi Ikan (AKI) berkolaborasi dengan perguruan tinggi. Perhitungan Angka Konsumsi Ikan (AKI) pada tahun 2021 didapatkan sebesar 45,92 kg/kapita/tahun dengan target sebesar 46 kg/kapita/tahun atau hanya terealisasi sebesar 99,83%. Output kegiatan tersebut adalah terlaksananya Angka Konsumsi Ikan (AKI) masyarakat di NTT;
- Kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Bidang P3KP antara lain adalah operasional kegiatan pelayanan dan pembinaan SKP;
- Pengujian dan kegiatan serta praktek mahasiswa Undana selama 12 (dua belas) bulan dan PKL selama 1 (satu) bulan dan mahasiswa dari Kefamenanu Timor Tengah Utara (TTU) serta melakukan pengujian organoleptik, mikro dan kimia dari anggaran sampel termasuk jasa dalam analisis tersebut. Pembelian bahan kimia untuk uji mikrobiologi dan operasional kegiatan di laboratorium Pengujian Produk Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) Kupang. Pagu anggaran sebesar Rp. 3.301.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.297.600 atau sebesar dengan hasil tersedianya bahan kimia untuk uji mikrobiologi dan operasional kegiatan di LPPMHP Kupang;
-

Selain melaksanakan kegiatan yang menggunakan dana yang bersumber dari APBD, bidang P3KP juga melakukan kegiatan yang bersumber dari APBN, adapun rincian kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

- Salah satu kegiatan perizinan yang diakomodir oleh bidang P3KP adalah Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) oleh daerah dengan target 7 (tujuh) rekomendasi yang terealisasi sebesar 63 (enam puluh tiga) rekomendasi atau terealisasi sebesar 900%. SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada Unit Pengelolaan Ikan (UPI) yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikan Yang Baik/ GMP (*Good Manufacturing Practices*) dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Sanitasi Standar (*Standar Sanitation Operating Procedure* (SSOP). Output kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan rekomendasi Penerbitan Sertifikat Kelayakan (SKP) oleh daerah sebanyak 63 (enam puluh tiga) rekomendasi;
- Fasilitasi dan pembinaan UMKM yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program dengan target 24 (dua puluh empat) pelaku usaha. Output kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan fasilitasi dan pembinaan UMKM oleh daerah sebanyak 63 (enam puluh tiga) UMKM atau terealisasi sebesar 262,5%;
- Perizinan lain yang dilakukan oleh bidang P3KP adalah SIPI. SIPI merupakan izin tertulis yang harus dimiliki oleh perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan. Sepanjang Tahun 2021, bidang P3KP mengeluarkan 61 (enam puluh satu) SIUP dan 113 (seratus tiga belas) rekomendasi yang terdiri dari 50 (lima puluh) UPI dan 63 (enam puluh tiga) SKP.

Tabel 6. Alokasi Dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Dinas Kelautan Dan Perikanan

No	SUMBER DANA		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Keuangan %
1.	APBD (Belanja Publik)		63.138.407.170	60.521.406.706	95,86
	a.	Belanja Tidak Langsung	18.763.076.062	17.355.549.850	92,50
	b.	Belanja Langsung	44.375.331.108	43.165.856.856	97,27
1.1	Program Pengelolaan Ruang Laut		1.808.381.060	1.560.449.680	86,29
1.2	Program Pengembangan Perikanan Tangkap		38.870.893.555	38.269.941.700	98,45
1.3	Program Perikanan Budidaya		3.273.141.213	2.951.638.316	90,18
1.4	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		300.823.300	292.124.160	97,11
1.5	Program Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan		122.091.980	91.703.000	75,11
2	DAK		14.536.850.320	13.874.306.453	95,96
	a	BIAYA PENUNJANG	322.350.320	292.715.453	90,81
3.	APBN (Dekonsentrasi)		1.664.633.000	1.640.912.359	98,58
	a.	Sekretariat Jenderal (01)	427.944.000	425.211.500	99,36
	b.	Ditjen Perikanan Tangkap (03)	348.640.000	344.640.000	98,85
	c.	Ditjen Perikanan Budidaya (04)	445.550.000	443.550.000	99,55
	d.	Ditjen PSDKP (05)	156.902.000	152.046.009	96,91
	e	Ditjen P2HP (06)	129.097.000	129.053.000	99,97
	f.	Ditjen KP3K (07)	156.500.000	146.411.850	93,55
4.	TP		1.200.000.000	0	0

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai target pendapatan sebesar Rp 13.789.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 5.750.138.637,45 atau 41,70 dengan rincian pada tabel 7 :

**Tabel 7. Penerimaan Retribusi Daerah Dinas Kelautan Dan Perikanan
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021**

NO	DASAR HUKUM	KODE REKENING	URAIAN	TARGET DPA	TARGET DPPA	s/d BULAN INI	%	KET
1	2	3	4	5		8	9	10
		4 4,1 4.1.02 4.1.02.02	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah (PAD) Retribusi Daerah Retribusi Jasa Usaha					
A.	Perda No. 81 Tahun 2019	4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	932.125.000	500.000.000	1.170.600.330	234,32	
		4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	932.125.000 932.125.000	500.000.000 500.000.000	1.171.600.330,00 1.171.600.330,00	234,32	
B.	Perda No. 81 Tahun 2019	4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	117.875.000	120.000.000	155.530.000,00	129,61	
		4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir Retribusi Pelayanan Tempat Khusus	117.875.000	120.000.000	155.530.000,00	129,61	

			Parkir	117.875.000	120.000.000	155.530.000,00		
C.	Perda No. 81 Tahun 2019	4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	1.050.000.000	505.000.000	510.505.912,00	101,09	
		4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	1.050.000.000	505.000.000	510.505.912,00	101,09	
			Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	1.050.000.000	505.000.000	511.505.912,00		
D.	Perda No.81 Tahun 2019 dan	4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	21.500.000.000	12.664.000.000	3.912.502.395,45	30,89	
	Perda No. 7 Tahun 2020	'4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih Ikan	21.500.000.000	12.664.000.000	3.912.502.395,45	30,89	
			Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih Ikan		12.664.000.000	3.923.777.294,45		
			JUMLAH	23.600.000.000	13.789.000.000	5.750.138.637,45	41,70	

C. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Permasalahan Yang Dihadapi

1. Produksi Rumput Laut turun dikarenakan adanya badai seroja sehingga menyebabkan banyaknya sarana dan prasarana budidaya yang rusak.
2. Tidak tercapainya produksi perikanan budidaya air tawar dikarenakan induk tidak dapat menghasilkan benih yang mencukupi yang disebabkan kurangnya debit air akibat kemarau panjang sehingga BBIS Noekele tidak dapat memproduksi benih yang akan didistribusikan ke masyarakat.
3. Menurunnya tingkat produksi perikanan tangkap dikarenakan banyaknya armada yang rusak disebabkan badai seroja.
4. Masih kurang sarana pendukung produksi pada daerah yang dianggap potensial.

Upaya pemecahan Masalah

1. Diperlukan pemberian bantuan sarana dan prasarana budidaya, pelatihan, pendampingan, menyediakan bibit unggul rumput laut, bantuan sarana pendukung berupa sampan bagi kelompok pembudidaya;
2. Diperlukan peningkatan debit air dengan cara melakukan pengeboran atau membuat jaringan sumber air dari bendungan dan penambahan calon induk yang unggul dan tersertifikasi serta meningkatkan bantuan benih unggul kepada masyarakat pembudidaya;
3. Diperlukan investor untuk mendatangkan kapal penangkap dari luar NTT dan meningkatkan bantuan sarana penangkapan kepada masyarakat;
4. Perlu melaksanakan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) dengan membuat jaringan distribusi produksi perikanan dan membangun fasilitas pasca panen berupa ICS (Integrated Coldstorage System) di daerah yang dianggap potensial.

B A B IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 terealisasi sebagai berikut :

- a. Total Dana yang dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 dari APBD I (Belanja Publik) mencapai Rp. **63.138.407.170,-** Realisasi pelaksanaan selama Tahun 2021 secara keseluruhan mencapai Fisik 97,73% dan Keuangan Rp. **60.521.406.706,-** (95,86%).
- b. Pengelolaan APBN secara keseluruhan mencapai Rp. **1.664.633.000,-** dengan realisasi pelaksanaan fisik mencapai 98,58% dan keuangan 98,58% atau Rp. **1.640.912.359,-**
- c. Realisasi komponen target Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 adalah :
 - Produksi Perikanan Tangkap sebesar 183.544 Ton (102,29) sedangkan Produksi Perikanan Budidaya sebesar 2.138.874 Ton (101,16%)
 - Penerimaan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp. 5.750.138.637,45,- atau 41,70% dari target Rp. 13.789.000.000,-

B. Saran

Untuk mendukung peningkatan realisasi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur maka diperlukan adanya : pelatihan, pendampingan, menyediakan bibit unggul rumput laut, bantuan sarana pendukung berupa sampan bagi kelompok pembudidaya; Peningkatan debit air dengan cara melakukan pengeboran atau membuat jaringan sumber air dari bendungan dan penambahan calon induk yang unggul dan tersertifikasi serta meningkatkan bantuan benih unggul kepada masyarakat pembudidaya; investor untuk mendatangkan kapal penangkap dari luar NTT dan

meningkatkan bantuan sarapa penangkapan kepada masyarakat; dan pembangunan sarana pendukung setelah produksi di daerah yang dianggap petensial.

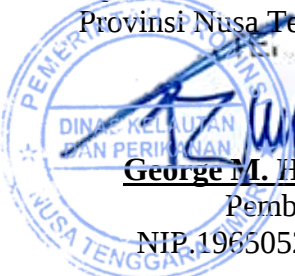
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur ini disusun berdasarkan hasil pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi melalui berbagai kegiatan di Tahun 2021, semoga bermanfaat.

LEMBARAN VERIFIKASI LEVEL 1 LKIP 2021
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No	Reviewer	Catatatan /koreksi
1	Fungsional Perencanaan	- Verifikasi data capaian bidang dan kendala pencapaian indikator, PK 2021 - Perhitungan prosentase capaian - Edit penulisan, font, kerapian, knsistensi
2.	Sekretaris	Data Gambaran perangkat daerah dan sumber daya – diupdate
3.	Plt.Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. NTT	Final reviu, indikator, capaian dan penyebab target tidak tercapai

Kupang, 14 Januari 2022

Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,


George M. Hadjoh, SH
 Pembina
 NIP.19650528 198603 1 014